

MANAJEMEN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR BANDANG DI DESA BEUREUNUT KECAMATAN SEULIMUM KABUPATEN ACEH BESAR

Azmeri¹, Safrida², Rahmi Mironi³

¹) Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Syeh Abdul Rauf No. 7, Darussalam Banda Aceh 23111, email: azmeri@unsyiah.ac.id

²) Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Darussalam Banda Aceh 23111, email: rida_aceh@yahoo.com

³) Manajemen Ilmu Kebencanaan, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala
Jl. Hamzah Fanshuri No. 3 Gedung Hyogo Prefectue, Darussalam Banda Aceh 23111,
email: ririen.mironi@yahoo.co.id

Abstrak: Selama dua puluh tahun terakhir telah terjadi empat kali banjir bandang pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Teungku Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar yaitu tahun 1987, 2000, 2013, dan terakhir Januari 2016. Kejadian banjir bandang berulang ini menimbulkan dampak besar pada Desa Beureuneut yang berada dihilirnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi manajemen kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir bandang berulang tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* dengan analisis kualitatif. Manajemen kesiapsiagaan terhadap bencana banjir bandang meliputi 5 parameter penting yaitu perencanaan, organisasi, aksi, kontrol, dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Beureunut belum memiliki perencanaan yang baik untuk menghadapi banjir bandang. Meskipun organisasi kebencanaan di Desa Beureunut sudah terbentuk, namun pembinaan terhadap organisasi belum optimal. Belum optimalnya organisasi kebencanaan tersebut menyebabkan kemampuan penyelamatan diri masih bersifat individu. Desa ini juga belum memiliki alat pendeteksi peringatan dini banjir bandang. Hasil penelitian juga menunjukkan belum adanya pihak terkait yang mengontrol dan mengevaluasi kegiatan kesiapsiagaan masyarakat secara kontinu. Secara menyeluruh, manajemen kesiapsiagaan masyarakat Desa Beureunut masih belum optimal dan memerlukan strategi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Perhatian untuk manajemen kesiapsiagaan dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dibantu pemerintah daerah dalam hal ini BPBD dan Dinas Sosial. Berdasarkan penelitian ini diharapkan selanjutnya pihak terkait dapat menetapkan program kerja sebagai strategi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan meminimalisir dampak bencana banjir bandang berulang.

Kata kunci : Kesiapsiagaan, Banjir bandang, Desa Beureunut, Organisasi Kebencanaan.

Abstract: Over the last twenty years there have been four flash-floods at the Krueng Teungku watershed in Seulimeum subdistrict, regency of Aceh Besar. The flash-floods have been happened in the year of 1987, 2000, 2013, and the last in January 2016. These recurring flash-flood events have a big impact on Beureuneut village which lies on the downstream. The purpose of this research is to identified Community Preparedness and Disaster Management (CPDM) in facing the recurring flash-flood disasters. The method of data collection conducted through triangulation in qualitative analysis. Preparedness Management toward the flash-flood disasters includes 5 important parameters, namely planning, organization, action, control, and evaluation. Based on the research results, the community of Beureunut village did not have a good plan to deal with flash floods. Despite organizational disaster in Beureunut village has been formed, but guidance to the organization has not been optimal. A non-optimal organizational disaster result in self-rescue capability is still individual. The village also has not had an early warning flash-flood detection system. The results also show the absence of related parties that control and evaluate the preparedness of activities continuously. Therefore, the preparedness management of Beureunut village community is still not optimal and it is essential to have an improvement strategy of community preparedness. The concern of

management preparedness can be done by the community itself assisted by local governments, in this regard, Local Agency for Disaster Management (BPBD) and Social Service department. Based on this study, it is expected the parties may establish the sustainability related work program as a strategy to increase community preparedness to increase the capacity and to minimize the impact of recurring flash-flood disasters.

Kata kunci : Preparedness, Flash Flood, Beureunut Village, Organisasi Kebencanaan.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang sering terkena bencana banjir bandang. Salah satu wilayah yang terdampak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Teungku Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar, yang terjadi pada tahun 1987, 2000, 2013, dan terakhir Januari 2016. Banjir bandang berulang yang terjadi di Gampong Beureuneut berasal dari volume air yang besar dari hulu DAS Krueng Teungku. Kejadian tersebut diakibatkan oleh jebolnya bendungan alam di Sungai Krueng Teungku yang terbentuk oleh material tebing sungai yang longsor akibat curah hujan yang tinggi. Azmeri (2015) telah melakukan analisis perilaku banjir bandang akibat keruntuhan bendungan alam dengan melakukan simulasi permodelan keruntuhan bendungan. Berdasarkan validasi elevasi banjir antara pemodelan dan observasi di lapangan, keruntuhan bendungan alam di Sungai Krueng Teungku akibat *overtopping* air di atas bendungan alam.

Banjir bandang merupakan salah satu jenis bencana banjir yang perlu terus diwaspadai oleh masyarakat. Karakter banjir yang datang secara tiba-tiba dan menyusutnya juga cepat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di hilir sungai. Kesiapsiagaan dari masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman bencana banjir bandang melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

Setelah analisis teknis yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penilaian kesiapsiagaan dan manajemen kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir bandang di Gampong Beureunut sebagai daerah rawan yang telah berulang kali terpapar banjir bandang. Tujuan dari manajemen kesiapsiagaan tersebut adalah untuk mengatur bagaimana suatu masyarakat yang rawan terhadap bencana mempersiapkan diri sebagai bentuk mitigasi risiko bencana banjir bandang.

KAJIAN PUSTAKA

UNESCO (2006) menyebutkan bahwa banjir bandang membawa efek yang negatif bagi masyarakat. Dampak dari banjir dibagi atas 4 aspek, yaitu: dampak fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perlu dilakukan kajian pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana banjir bandang. Dewita (2013) telah melakukan kajian pemahaman masyarakat terhadap bencana banjir bandang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh bahwa masyarakat daerah tersebut belum memahami banjir bandang baik penyebab maupun cara menghadapinya.

Manajemen kesiapsiagaan masyarakat dalam Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 memfokuskan pada 5 aspek yaitu:

- Perencanaan, mengkaji bagaimana rencana tanggap darurat yang meliputi prosedur tetap dan pembagian tugas masing-masing elemen sesaat setelah bencana terjadi.
- Pengorganisasian, mengkaji pengorganisasian dan pelatihan, yaitu pembentukan organisasi masyarakat yang siaga bencana serta pelatihan untuk peningkatan pengetahuan. Pengorganisasian dan pelatihan ini perlu dilakukan agar masyarakat yang berisiko bencana mempunyai wadah untuk mengembangkan diri, baik itu melalui pelatihan atau memberikan contoh bagi yang lainnya.
- Aksi, melihat bagaimana pelaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun oleh organisasi yang sudah terbentuk. Komponen yang termasuk dalam aspek ini berupa sistem peringatan dini, penyediaan kebutuhan dasar, lokasi evakuasi, dan penyediaan barang serta peralatan pemulihan prasarana dan sarana.

- d. Kontrol, mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berada di luar organisasi masyarakat ini, seperti pemerintah setempat yang berwewenang. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi kebencanaan akan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat.
- e. Evaluasi yaitu penilaian terhadap bencana yang dilakukan pada saat simulasi ataupun pada saat bencana benar-benar terjadi.

Nugroho (2007) memberikan 5 parameter yang digunakan dalam mengukur kesiapsiagaannya suatu kelompok maupun masyarakat yang diadopsi dari LIPI – UNESCO, yaitu: pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, perencanaan kedaruratan, sistem peringatan, dan mobilisasi sumberdaya. Sementara itu menurut Dodon (2013) mengkaji kesiapsiagaan dilihat dari 5 indikator yang diadopsi dari LIPI yaitu: pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, sumberdaya pendukung dan modal sosial.

Menurut Purwana (2013) suatu masyarakat menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan, karena secara tidak langsung akan memberikan keuntungan bagi mereka. Disinilah perlunya manajemen yang bisa memberikan arahan dan aturan sehingga bisa mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan untuk kedepannya. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat yang memberikan peningkatan kapasitas masyarakat dapat berupa fisik dan non-fisik. Kegiatan fisik seperti pemanfaatan lahan dengan tepat dan penyediaan tempat evakuasi. Sedangkan peningkatan kapasitas non-fisik seperti mempelajari gejala alam untuk mengetahui tanda-tanda datangnya bencana, sampai saling mengingatkan di antara sesama untuk siaga dapat membentuk kesiapsiagaan sebagai budaya dalam komunitas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisisnya bersifat kualitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Beureunut, sedangkan sampel yang diambil adalah Kepala Keluarga (KK) yang terkena dampak banjir bandang dan pimpinan Gampong. Teknik sampling yang digunakan adalah *snowball sampling* dengan pengambilan data yang pada awalnya berjumlah sedikit namun lama kelamaan semakin banyak sampai informasi yang diterima sudah jenuh atau tidak ada informasi yang baru lagi (Sugiyono, 2012). Sampel pertama yang dipilih merupakan informan yang sangat mengenali wilayah penelitian sehingga menjadi pembuka pintu penelitian untuk sampel berikutnya agar memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Selengkapkan bagan alir penelitian diberikan pada Gambar 1.

HASIL PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai banjir bandang dan pemahaman mengenai mitigasi bencana banjir bandang sangatlah kurang. Idealnya, keberhasilan dari pelaksanaan mitigasi adalah dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat yang tinggi mengenai pentingnya dilakukan mitigasi terhadap daerah yang rawan bencana alam sehingga akhirnya masyarakat akan selalu siapsiaga terhadap bencana banjir bandang yang akan terjadi.

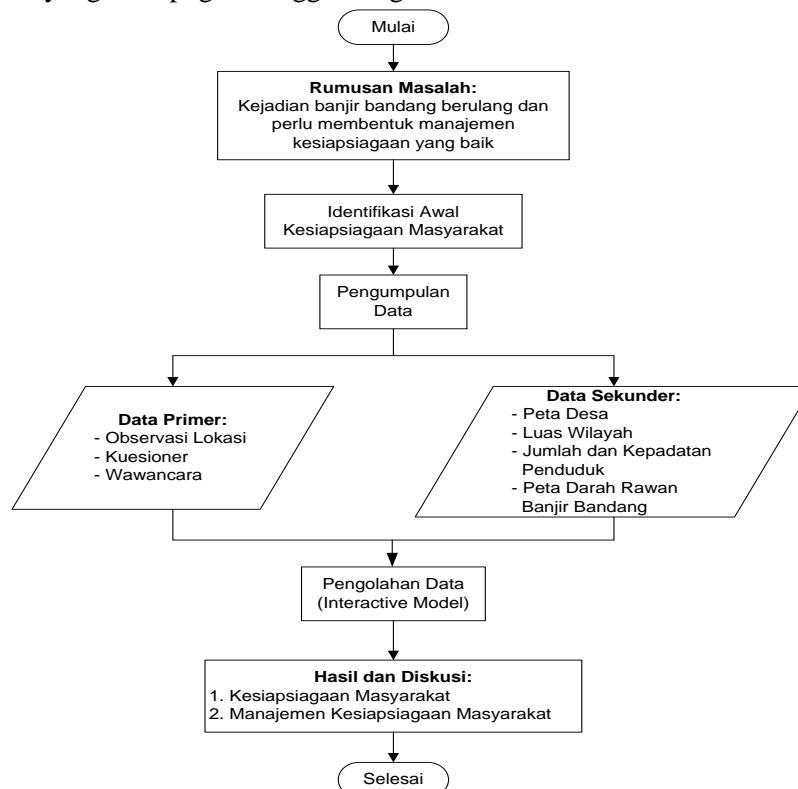
Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis yang telah dilakukan, kelima aspek manajemen kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir bandang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan narasumber, masyarakat Gampong Beureunut belum memiliki perencanaan yang baik dalam menghadapi banjir bandang. Selama ini, tindakan yang dilakukan hanya kemampuan masing-masing individu untuk menyelamatkan diri. Kondisi perekonomian masyarakat membuat mereka belum mempunyai dana khusus untuk menghadapi masa tanggap darurat bencana.

Jika dilihat dari tempat berkumpul bersama setelah bencana banjir bandang, belum semua masyarakat menyepakati lokasi evakuasi sesaat terjadinya banjir bandang. Suasana panik membuat masyarakat

kat terpencar. Akan tetapi semua narasumber mengatakan bahwa seluruh anggota keluarga sudah mengetahui lokasi yang bertopografi tinggi sebagai tempat evakuasi.



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi kebencanaan di Gampong Beureunut sudah terbentuk melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh dosen Unsyiah dan beberapa mahasiswa pada tanggal 22 Agustus 2014. Namun demikian, keberadaan dan peran organisasi ini belum maksimal mengingat usia yang baru dan kualitas organisasi yang masih perlu pembenahan dari semua pihak. Organisasi kelompok masyarakat siaga bencana banjir bandang tersebut melibatkan beberapa wakil masyarakat saja. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap keberadaan dan fungsi organisasi kebencanaan tersebut oleh pemerintah gampong setempat. Masyarakat Gampong Beureunut belum pernah mendapatkan pelatihan untuk menghadapi banjir bandang. Kegiatan mitigasi bencana banjir bandang baru sebatas sosialisasi penyebab dan dampak banjir bandang khusus bagi kelompok masyarakat.

c. Aksi (*Action*)

Sebagai tindakan/aksi dalam manajemen kesiapsiagaan, Gampong Beureunut belum memiliki alat pendeteksi peringatan dini banjir bandang. Namun demikian, jika mulai terlihat tanda-tanda banjir bandang berupa awan yang gelap dan hujan dengan intensitas yang tinggi dalam beberapa hari di bagian hulu berupa, maka mereka akan mengumumkannya di masjid atau meunasah agar masyarakat bersiap-siap untuk menyelamatkan diri. Tidak ditunjuk petugas khusus untuk membuat pengumuman melalui *microfon*, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja yang memang berada dekat dengan masjid atau meunasah.

Masyarakat Gampong Beureunut belum menyediakan barang kebutuhan dasar untuk menghadapi masa darurat bencana. Tas siaga bencana yang seharusnya disiapkan oleh masing-masing keluarga juga tidak tersedia pada keluarga-keluarga di gampong ini. Penyelamatan hanya dilakukan untuk arsip-arsip penting seperti buku nikah, kartu keluarga, KTP, surat tanah dan ijazah. Hal ini di

lakukan berdasarkan pengalaman pada saat terjadi banjir bandang sebelumnya, banyak warga yang kehilangan surat penting dan menyulitkan dalam pengurusan administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gampong ini sudah memiliki rambu-rambu dan juga tempat evakuasi. Rambu-rambu evakuasi ini merupakan bantuan yang diberikan oleh dosen Unsyiah pada saat memfasilitasi pembentukan organisasi kebencanaan. Tempat evakuasi yang disepakati adalah kantor kepala desa dan puskesmas pembantu yang bertopografi tinggi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen bencana yang sudah disusun oleh gampong dan organisasi kebencanaan. Dalam hal organisasi kebencanaan di Gampong Beureunut memang sudah terbentuk, namun masih perlu pembinaan agar bisa berfungsi maksimal. Pengawasan dari pihak luar tentu sangat diperlukan, terutama sekali dari pemerintah dan juga pihak yang sudah membantu membentuk organisasi ini. Selama ini, pengawasan secara menyeluruh belum dilakukan untuk organisasi kebencanaan. Untuk kesiapsiagaan masyarakat, belum terdapat pihak lain yang mengawasinya, sehingga masyarakat bergerak sendiri sesuai dengan kemampuannya.

e. Evaluasi

Evaluasi terhadap organisasi kebencanaan dapat dilakukan oleh pemerintah gampong maupun dinas terkait seperti BPBD dan Dinas Sosial. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki manajemen yang sudah tersusun jika tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pihak yang mengevaluasi terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Beureunut Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Beureunut belum memiliki kesiapsiagaan yang cukup terhadap bencana banjir bandang. Berdasarkan manajemen kesiapsiagaan, masyarakat Gampong Beureunut belum terlaksana secara optimal. Hal ini karena masih kurangnya pemahaman tentang unsur-unsur manajemen sehingga belum dapat dijalankan dengan baik. Terdapat beberapa hal yang telah dipahami oleh masyarakat, namun banyak hal juga yang belum dilakukan sama sekali. Peningkatan manajemen kesiapsiagaan dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan meningkatkan kualitas kesiapsiagaannya, maupun pihak luar dalam hal ini aparat gampong, BPBD dan Dinas Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmeri, Alfiansyah Yulianur, Vina Listia, 2015. Analisis Perilaku Banjir Bandang akibat Keruntuhan Bendungan Alam pada Daerah Aliran Sungai Krueng Teungku Provinsi Aceh. Jurnal Teknik Sipil ITB, Vol 22 No.3.
- Dewita, R. Dasrizal, dan Erita, Y., 2013. Studi Pemahaman Masyarakat Tentang Mitigasi Bencana Banjir bandang di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
- Dodon, 2013. Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat Di Permukiman Padat Penduduk Dalam Antisipasi Berbagai Fase Bencana Banjir. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 24. No.2:125-140.
- LIPI-UNESCO/ISDR, 2006. Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Jakarta.
- Nugroho, A, C. 2007. Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana, MPBI-UNESCO, Jakarta.
- Purwana. R., 2013. Manajemen Kedaruratan Kesehatan Lingkungan dalam Kejadian Bencana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana.